

INTERAKSI NEGARA DENGAN DUNIA PENDIDIKAN ISLAM DARI MASA KE MASA

Supandi

Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan

Email: supandiarifin200@gmail.com

Abstrak

Selama kurang lebih 15 abad yang lalu, sejarah Islam telah memberikan potret wajah kondisi pendidikan Islam yang sebenarnya, bukan hanya menggambarkan realitas kejadian masa lalu, melainkan juga berfungsi sebagai pemandu bagi generasi selanjutnya, agar mampu menjadikan pijakan yang lebih baik. Pada dasarnya, dengan datangnya Agama Islam di bumi nusantara ini, karena salah satunya melalui dunia pendidikan, disamping melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Peran dan kiprah pendidikan Islam dalam merebut dan menyatukan bumi nusantara ini menjadi suatu Negara yang saat ini bernama Indonesia tentunya sangatlah banyak. Sehingga dengan demikian, dalam tulisan ini, penulis sedikit menyingkap tabir sejarah pendidikan Islam pada masa orde lama, orde baru dan bahkan pada masa orde reformasi saat ini. Negara mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam dunia pendidikan Islam, sehingga, kondisi pendidikan Islam dari masa kemasa mempunyai kedudukan dan bahkan porsi yang sangat berbeda dari pemerintah yang kemudian berimplikasi kepada hasil implementasi pendidikan Islam tersebut.

Kata Kunci: Negara, Pendidikan Islam

Abstract

For about 15 centuries ago, Islamic history has portrayed the face of the true condition of Islamic education, not only describes the reality of past events, but also serves as a guide for the next generation, in order to make a better footing. Basically, with the coming of Islam in this archipelago, because one of them through education, beside through trade and marriage. The role and gait of Islamic education in seizing and uniting the archipelago into a country that is currently called Indonesia of course very much. Thus, in this paper, the author reveals a bit about the history of Islamic education in the old order, the new order and even during the current order of reform. The state has enormous power in governing and running the wheels of government, including in the world of Islamic education, so, the condition of Islamic education from the time of kemasanya have position and even a very different portion of the government which then has implications for the implementation of Islamic education.

Keywords: State, Islamic Education

Pendahuluan

Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, adalah suatu kenyataan yang sudah berlangsung sejak lama, pada masa penjajahan Belanda dan penduduk Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat-tempat pendidikan dan latihan yang lainnya. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya yang berbentuk madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik di Indonesia, dari beberapa dekade pemerintahan, seperti orde lama, orde baru hingga orde reformasi.

Pemerintahan pada masa orde lama yang dimaksudkan, adalah rentang waktu 1945 sampai dengan 1965, yang diberi tugas oleh UUD 1945 untuk mengusahakan agar terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat Nasional. Oleh karena itu, pemerintah orde lama, telah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa itu, pasalnya, pemerintahan memandang bahwa, agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pengembangan suatu Negara, sehingga terdapat beberapa usaha yang dilakukan pengelola Negara yang dalam hal ini

adalah pemerintah yang diantaranya adalah dengan memberikan bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945.¹

Hal tersebut diperkuat lagi dengan berbagai kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam Bidang Pendidikan Islam antara lain yaitu:

1. Pada tanggal 17-8-1945 Indonesia merdeka. Tetapi musuh-musuh Indonesia tidak diam saja, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad *fi sabilillah* terhadap Belanda/ Sekutu.
2. Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama, dimana tugasnya mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurus sekolah Agama, seperti pondok pesantren dan madrasah.
3. Pada bulan desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan

¹ Dalam BPKNP tersebut menyebutkan bahwa: "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, maka dari itu hendaknya, mendapat perhatian dan bantuan nyata tututan dan bantuan material dari pemerintah selaku pengelola Negara.

mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI.²

Hal tersebut dilanjutkan pada masa berikutnya, yaitu asa orde baru, masa ini dimulai sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden Habibie pada 21 Mei 1998. Pada awal masa pemerintahan orde baru ini, kebijakan tentang pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah lembaga madrasah, bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum di pandang sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, akan tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan menteri Agama.

Sehingga pemerintah mengambil beberapa langkah untuk dilakukan, yang salah satunya adalah di keluarkannya kebijakan pemerintah pada tahun 1967 yang berfungsi sebagai respons yang positif terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966. Dan padadekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, pemerintah kemudian menegaskan kembali tujuan dan cita-cita pendidikan Nasional dengan dikeluarkannya TAP MPR

No.II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, No. 2 tahun 1989.

Hal tersebut kemudian di lanjutkan lagi pada masa reformasi, pada masa ini, pemerintah memberikan peluang yang lebih besar lagi pada lembaga pendidikan Islam, pasalnya, lembaga pendidikan Islam pada masa ini mempunyai peran dan kedudukan yang sama dengan sekolah pada umumnya, hal ini, kemudian diperkuat lagi dengan ditetapkannya undang-undang tentang guru dan dosen pada tahun 2003 yang didalamnya juga telah enangkut pembahasan pendidikan Islam.

Pembahasan

A. Pandangan Negara terhadap pendidikan Islam

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi, yang kekuasaannya meliputi politik, militer, ekonomi, sosial-budaya, hingga pengaturan dan pelaksanaan pendidikan, semua yang menyangkut aktivitas masyarakat dalam suatu Negara tersebut, diatur dan ditetapkan oleh kepala Negara yang berada di wilayah tersebut.³ Negara adalah organisasi politik dari kekuasaan politik, sehingga Negara merupakan bentuk

² Walaupun pada masa tersebut, keadaan keamanan di Indonesia masih belum mantap sehingga SKB Dua Menteri belum dapat berjalan dengan semestinya.

³ Sjaichan Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), 33-38.

organisasi dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan, dengancara menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama, termasuk didalamnya adalah unsur pendidikan.

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak masuknya Islam ke Indonesia, dan menurut penuturan sejarah, masuknya Islam ke Indonesia, mereka masuk dengan damai, dengan melalui beberapa kultur, seperti perdagangan, perkawinan dan bahkan pendidikan.⁴ Pemaknaan dari pendidikan Islam itu sendiri, adalah kegiatan pengajaran dengan sasaran utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan ke-Islaman dan menanamkan sikap hidup beragama kepada peserta didik.⁵ Sedangkan pengertian pendidikan Islam itu sendiri, menurut Athiyah Al-Abbasyi berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah bukan hanya mengisi otak anak dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, akan tetapi untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka, serta menanamkan rasa ke utamaan (*fadilah*), dan membiasakan mereka dengan

kesopanan yang tinggi dan mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur.⁶

Di Indonesia sendiri, lembaga pendidikan Islam berkembang dengan berbagai macam ragam, yang diantaranya adalah *Madrasah*,⁷ *Pesantren*,⁸ *Dayah*,

⁶ Athiyah al-Abbasyi, *Dasar-dasar pokok pemikiran Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 15.

⁷ Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penamaannya diambil dari bahasa arab dari kata "*Madrasah*" yang berarti sekolah, menurut Maksum, pelajaran yang diberikan pada madrasah ini merupakan kelanjutan dari yang diajarkan di masjid-masjid yang dikenal dalam bentuk *halaqah* yang kemudian mengalami perkembangan dan membentuk pelembagaan pendidikan Islam secara formal. Lihat Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), vii.

⁸ Istilah Pondok berasal dari bahasa arab yaitu *funduq* (lihat di Abid Al-Bisri, Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 564) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana. Wahjoetomo, (*Pesantren* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 70.) Sedangkan dalam istilah lain dikatakan bahwa pesantren berasal dari kata *santri*-an, dimana kata *santri* berarti murid dalam Bahasa Jawa. Sedangkan Istilah pondok berasal dari Bahasa Arab *funduq* (فندق) yang berarti penginapan. (Abid-Albisri, Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri*, 564.). Pendapat lainnya, pesantren berasal dari kata *santri* yang mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* (Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam- dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 26.) dan dapat diartikan tempat santri belajar. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kata *santri* berasal dari kata *Cantrik* bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut *pawiyatan*, Istilah *santri* juga ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji. (Umi Chultsum, Windy Novita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kasiko, 2006), 531.). Sedangkan secara istilah pondok pesantren adalah lembaga pendidikan orang-orang Islam, (Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam*,

⁴ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam system Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

⁵ Tim penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Blaupustaka, 2000), 153.

Rangkang, dan *Surau* dan lain sebagainya. Beberapa nama lembaga pendidikan tersebut, merupakan numenkatur pendidikan yang dikenal di Negara Indonesia.⁹ Terdapat banyak sekali kajian terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut yang dilakukan oleh para kalangan sarjana, dan terlepas dari perspektif yang ditawarkan dalam studi-studi tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan *khazanah* Islam Indonesia, yang masing telah memainkan peranannya, dan mampu untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan Negara, untuk melaksanak tugas pembetulan generasi yang berkualitas baik dan berkarakter, dan semua itu sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga pendidikan Islam tersebut.

Respon positif Negara, terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam, merupakan suatu peluang besar bagi para penyelenggara dan pelaksana lembaga pendidikan Islam, untuk dapat mengembangkan lembaga pendidikan Islam pada arah yang lebih baik, respon positif pemerintah, sebagaimana telah disepakatinya SKB tiga menteri¹⁰ yang tujuannya adalah untuk mensejajarkan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum, dengan menawarkan porsi muatan kurikulum masing-masing 70% berisi muatan pelajaran umum, dan porsi 30% berisi muatan pelajaran

(Jakarta: Kencana, 2004),27.), dimana para santri biasanya tinggal di pondok (*asrama*) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang bersifat tradisional, dan kitab-kitab umum, yang bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pondok pesantren secara definitif tidak dapat diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan kata pondok berasal dari *funduq* (bahasa Arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar atau para santri yang jauh dari tempat asalnya. Dalam istilah lain dikatakan pesantren berasal dari kata pe-santri-an, yang mana kata ini berasal dari kata *santri* berarti murid dalam bahasa Jawa. Sedangkan menurut Zubaedi, pondok pesantren adalah salah satu model pendidikan yang berbasis masyarakat yang kemudian kita kenal dengan istilah perguruan swasta yang mempunyai kemampuan tinggi dalam berswakarsa, dan swakarya dalam menyelenggarakan suatu program pendidikan, (Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.) yang bertujuan untuk membentuk tatanan sosial melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan yang bernuansa Islam.

⁹ Keragaman lembaga pendidikan Islam tersebut, terjadi bukan hanya pada tingkatan kurikulum, akan tetapi juga lebih dari yang substansial, seperti kurikulum, referensi rujukan hingga model pembelajaran yang ditetapkan. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20: pergumulan antara modernisasi dan Identitas*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), x.

¹⁰ SKB 3 menteri tersebut diantaranya adalah menteri Agama, menteri pendidikan dan kebudayaan dan juga menteri dalam Negeri), dalam keputusan tersebut berisi diantaranya adalah (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, (2) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas, (3) siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat. Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 176.

agama. Walaupun demikian, problematika pengembangan lembaga pendidikan Islam masih cukup menuai beberapa persoalan yang kemudian menuntut pemerintah dan juga pengelola serta pelaksana pendidikan Islam itu sendiri, untuk lebih keras lagi berusaha untuk meminimalisir persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam, persoalan-persoalan yang muncul dalam pendidikan Islam tersebut diantaranya adalah:

- a. Pemahaman SKB tiga menteri tersebut yang hanya difahami secara simbolik oleh para pelaksana pendidikan Islam, sehingga 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama masih belum terlaksana dengan sepenuhnya,
- b. Banyak para lulusan madrasah yang tidak sesuai dengan yang di canangkan, mereka tidak mempunyai kompetensi yang bagus dalam bidang pelajaran umum dan juga dalam bidang agama, mereka hanya akan menjadi lulusan yang serba tanggung dan tidak menyeluruh.

Melihat persoalan yang demikian tersebut, maka pemerintah menawarkan solusi alternative yang lain, yaitu dengan merumuskan sekolah keagamaan yang kemudian dikenal dengan istilah (MAPK) atau Madrasah Aliyah Program Khusus. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian

yang khusus terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam, hal tersebut di implementasikan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan madrasah dalam konteks pendidikan Nasional. Terdapat beberapa hal yang dilakukan pemerintah yang diantaranya adalah dengan menyatakan:

1. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat,
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas,
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.¹¹

B. Pendidikan Islam dari masa ke masa

1. Pendidikan Islam masa orde lama

Ketika berbicara spesifik pada pendidikan Islam pada masa orde lama ini, pada hakikatnya masih belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, karena, pada masa orde lama ini, Negara Indonesia masih dibaratkan sebagai bayi yang baru lahir dari ibunya, tubuhnya masih lemah, otaknya masih kosong dan masih memerlukan banyak pelajaran untuk berkembang dari berbagai aspek, misalnya saja struktur kenegaraan

¹¹ Peraturan tersebut, tertuang dalam undang-undang pendidikan pada bab II pasal 2 tahun 1975M, lihat di Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, 176.

Republik Indonesia masih baru dibangun, komunikasi dan dukungan perlu dijalin dengan berbagai negara luar, dan modal untuk membangun negara tersebut masih perlu diusahakan.

Sehingga berbagai macam problematika kemudian muncul kepermukaan, mulai dari persoalan ideologis politik dari sebagian elite politik Islam yang kemudian mengakibatkan kecurigaan pemerintah dan rasa tidak suka kepada umat Islam, kondisi ini terus berkelanjutan sehingga seolah terjadi perang dingin antara pemerintah orde lama dengan tokoh dan elit politik Islam yang kemudian berimplikasi terhadap tidak mendapatkannya perhatian yang serius dunia pendidikan Islam ini.

Namun disisi yang lain, pada masa orde lama ini kemudian pemerintah memberikan kebijakan untuk memperhatikan kepentingan Agama ini dengan beberapa cara yang diantaranya adalah:

- a) Pendirian Departemen Agama, pembinaan pendidikan Agama setelah kemerdekaan Indonesia dilakukan secara formal dan institusional.¹² Urusan Agama dan pendidikan Agama yang semula ditangani oleh kantor Agama yang pada masa penjajahan

Belanda bernama kantor *Voor Inlandshe Zaken*, kemudian pada masa kependudukan jepang berubah menjadi “*shumuka*” dan setelah Indonesia merdeka menjadi Kementerian Agama yang di resmikan pada tanggal 3 Januari 1946.

- b) Mengeluarkan sejumlah kebijakan peraturan baru dan perundang undangan yang ada hubungannya dengan pendidikan Agama, seperti Undang-undang no 12 Tahun 1950 yang didalamnya mengatur tentang pendidikan Agama di sekolah Negeri, baik yang ada dibawah naungan Departemen Agama maupun yang ada dibawah naungan pendidikan dan kebudayaan, hal tersebut kemudian disusul dengan surat keputusan bersama (SKB) antara menteri Agama dan Menteri pendidikan dan kebudayaan yang kemudian mengatur masalah pendidikan Agama dan pendidikan umum.
- c) Pemerintah memberikan perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren.
- d) Memberikan bantuan berupa fasilitas dan sumbangan material kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti mengangkat guru Agama, membantu biaya pembangunan

¹² Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1994), 62.

madrasah, bantuan buku-buku pelajaran dan lain sebagainya.

Sehingga dalam rangka merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang dibentuk pada akhir tahun 1945, dalam laporannya mengenai bentuk pendidikan Islam lama dan baru dinyatakan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat, berakar didalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian pemerintah yang serius dan mendapatkan bantuan material dari pemerintah. Namun karena madrasah dan pesantren memfokuskan diri untuk mengkaji dan membahas masalah agama, maka pemerintah memasrahkan kepada kementerian agama untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut.

2. Pendidikan Islam masa orde baru

Secara umum, masa orde baru ini, kebijakan secara umum diarahkan kepada pembangunan ekonomi yang didukung oleh kondisi politik dan keamanan yang stabil, berdasarkan kebijakan ini, maka kerja sama yang harmonis antara Pemerintah dan angkatan bersenjata dan kaum pengusaha perlu untuk dibangun dengan sebaik mungkin. Sehingga untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, maka Pemerintah pada masa orde baru ini menggunakan pendekatan yang

sentralistik dan mono loyalitas dalam seluruh aspek kehidupan.

Termasuk dalam dunia pendidikan Islam, implementasi pendidikan Islam diarahkan untuk menopang stabilitas ekonomi dengan pendekatan yang sentralistik, mono loyalitas, dan monopoli. Kebijakan politik yang terkait dengan pendidikan Islam dapat dipaparkan sebagaimana berikut:

- a) Masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan Nasional,
- b) Pembaharuan madrasah dan pesantren, baik secara fisik maupun non-fisik,
- c) Pemberdayaan pendidikan Islam non-formal,
- d) Peningkatan atmosfir dan suasana praktek sosial ke-Agamaan, dalam hal ini Pemerintah sangat mendukung terhadap lahirnya berbagai pranata ekonomi, sosial budaya, kesenian Islam, ikatan cendekiawan muslim se Indonesia, lahirnya Bank Muamalat dan lain sebagainya.¹³

3. Pendidikan Islam masa ode reformasi

Sejalan dengan berbagai macam kebijakan Pemerintah, terkait dengan pendidikan Islam, mulai dari masa penjajahan Belanda, Jepang dan sampai pada masa orde reformasi, pada hakikatnya pendidikan Islam mulai mengalami sebuah kemajuan yang cukup berarti dan lebih baik dari waktu ke waktu.

¹³ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, 334-337.

Pada masa orde reformasi ini, beberapa kebijakan pemerintah diantaranya adalah:

- a) Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional,
- b) Kebijakan tentang peningkatan anggaran tentang pendidikan Islam,
- c) Program wajib belajar sembilan tahun, yaitu setiap anak Indonesia, wajib belajar hingga minimal ke jenjang pendidikan SMP atau tingkat *Thanawiyah*,
- d) Penyelenggaraan sekolah bertaraf Nasional (SBN) dan International (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standart Nasional dan Internasional.
- e) Kebijakan sertifikasi guru dan dosen, bagi semua guru dan dosen baik Negeri dan Swasta, baik guru umum dan Agama, baik guru dibawah naungan Kemendikbud dan Kementerian Agama.

Arah kebijakan pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan kementerian agama bidang pendidikan 2015-2019 adalah:

- a) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - 1) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - 2) Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas;
 - 3) Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
 - 4) Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku.

- b) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:

- 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.
- 2) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.
- 3) Meningkatkan mutu peserta didik.
- 4) Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan.
- 5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya.
- 6) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

- c) Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:

- 1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan.
- 3) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan.
- 4) Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan inovasi perguruan tinggi keagamaan.

- d) Meningkatkan layanan pendidikan ke-Agamaan yang berkualitas meliputi:

- 1) Peningkatan akses pendidikan ke-Agamaan.
- 2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan.
- 3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan.
- 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan.
- 5) Peningkatan penjaminan mutu kelembagaan pendidikan keagamaan.
- 6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan.
- 7) Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk

- membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
- 8) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama.
 - 9) Peningkatan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan Agama.
 - 10) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan Agama.
- e) Meningkatkan tata kelola pendidikan Agama diarahkan pada upaya:
- 1) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
 - 2) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
 - 3) Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
 - 4) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
 - 5) Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - 6) Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah;
 - 7) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel, dan
 - 8) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan

pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.¹⁴

C. Kondisi Objektif Pendidikan Islam dan Masa Depan di Indonesia

Praktek pendidikan Islam di Indonesia ini sebagaimana digambarkan dalam antaran makalah ini, mereka mengalami pasang surut dari waktu ke waktu, dari masa pemerintahan orde lama, kemudian dilanjutkan pada periode masa orde baru, dan bahkan pada masa orde reformasi yang terjadi di akhir-akhir ini. Namun demikian, dalam perkembangan terakhir, relaitas lembaga pendidikan Islam menunjukkan kondisi wajah yang berbeda dari kondisi yang sebelumnya, salah satu indikatornya adalah jika dilihat dari sisi kuantitasnya yang semakin tahun, semakin mengalami penambahan jumlah kuantitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini.

Hal tersebut, ditambah lagi dengan ditambahkannya mata pelajaran agama pada jenjang lembaga pendidikan umum, bahkan bukan hanya itu, terdapat beberapa lembaga pendidikan umum yang mencanangkan dan memprogramkan pelaksanaan pondok kilat yang tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan lagi

¹⁴ Ibid, 135

pelaksanaan dan pemahaman para siswa terhadap pendidikan Islam, strategi yang lain adalah dilaksanakannya penyempurnaan kurikulum pendidikan Agama secara terus menerus yang dilakukan oleh lembaga pendidikan umum, sehingga pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah umum lebih proporsional dan fungsional.¹⁵

Berpijak dari kondisi yang demikian, maka masa pendidikan Islam di Indonesia tersebut ditentukan oleh dua factor, yang diantaranya adalah factor Internal dan factor eksternal lembaga pendidikan Islam itu sendiri, selain itu, isu demokratisasi lembaga pendidikan Islam juga dapat mempengaruhi masa depan pendidikan Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian, Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, mempunyai andil yang cukup kuat, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam, agar mereka dapat memerankan perannya di dalam kancah Negara.

D. Eksistensi Pendidikan Islam Sebagai Modal Pembangunan Nasional

Secara historis, eksistensi lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah pesantren dan madrasah, hampir bersamaan dengan masuknya Islam ke

Indonesia. Alasannya sangat sederhana. Islam, sebagai agama dakwah yang disebarkan secara efektif melalui proses transformasi ilmu dari para ulama kepada para masyarakat (*tarbiyah wa ta'lim*, atau *ta'dib*), dalam konteks ke Indonesiaan maka tentu proses ini berlangsung melalui lembaga pendidikan pesantren.

Secara bahasa, pesantren tidak sepenuhnya merujuk pada kata dalam bahasa Arab. Sebutan untuk pelajar yang mencari ilmu, bukan *murid* seperti dalam tradisi sufi, *thalib* atau *tilmidh* seperti dalam bahasa Arab, akan tetapi santri yang berasal dari bahasa Sanskerta. *San* berarti orang baik, dan *tra* berarti yang suka menolong. Dan lembaga tempat belajar itu pun kemudian mengikuti akar kata santri dan menjadi pe-santri-an atau “pesantren”.

Jadi, ada empat ciri utama dalam pesantren pesantren tersebut. Yang *Pertama*, pondok harus berbentuk asrama. *Kedua*, kiai sebagai sentral figur yang berfungsi sebagai guru, pendidik, dan pembimbing. *Ketiga*, masjid sebagai pusat kegiatan. Dan *keempat*, materi yang diajarkan tidak terbatas kepada kitab kuning saja. Menurut Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Penulis Peneliti di *Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization* (INSIST), dengan catur-pusat inilah, pendidikan pesantren berfungsi sebagai “*meltingpot*”, yaitu tempat untuk

¹⁵ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001), 12.

mengolah potensi-potensi dalam diri santri agar dapat berproses menjadi manusia seutuhnya (*insan kamil*).

Dengan demikian, karakter pendidikan pesantren bersifat holistik. Artinya, seluruh potensi pikir dan zikir, rasa dan karsa, jiwa dan raga dikembangkan melalui berbagai media pendidikan yang terbentuk dalam suatu komunitas yang sengaja didesain secara integral untuk tujuan pendidikan. Di tengah gencarnya kampanye pendidikan berkarater, pesantren justru sejak dari awal sudah menerapkannya. Tujuan pendidikan pesantren seperti halnya tujuan kehidupan manusia di dunia ini, yang diantaranya adalah, Santri tidak hanya disiapkan untuk mengejar kehidupan dunia, akan tetapi juga mempersiapkan kehidupan di akhirat.

Di sisi yang lain, saat ini sedang banyak dikembangkan sekolah-sekolah yang diberi label Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Akan tetapi jika kita melihatnya lebih dekat, sekolah-sekolah dengan label internasional tersebut hanyalah sekolah yang bertarif mahal (internasional), dan bukan sekolah yang berbahasa Inggris. Sekolah berstandar internasional yang sedang dirintis pemerintah juga dievaluasi dengan ujian nasional.

Jika Anda ingin melihat sekolah berstandar internasional, eksistensi Pondok Modern Gontor adalah salah satu bukti konkretnya. Tidak hanya santri wajib berbahasa Arab dan Inggris, Gontor juga mampu menarik siswa dari luar Negeri, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Brunai Darussalam, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan berbagai Negara lainnya. Inilah sekolah bertaraf internasional, walaupun tanpa label sekolah internasional.

Bahkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, dan jauh sebelum sistem pendidikannya mapan, pesantren dan para alumni-alumninya telah banyak berperan baik di nusantara, maupun kancah dunia. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19, tercatat nama-nama sekaliber Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah al-Fansuri, Abdul Rauf al-Sinkili, Syekh Yusuf al-Makassari, Abdussamad al-Falimbani, Khatib Minangkabawi, Nawawi al-Bantani, Muhammad Arsyad al-Banjari, dan lain-lain. Sosok-sosok alumni pesantren dan Timur-Tengah ini telah melahirkan karya-karya besar di bidang fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Citra intelektual dan ekspansi karya sosok-sosok ini bukan hanya sebatas taraf domestik nusantara, tapi juga sampai diakui di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Contoh kongkrit tersebut, hanyalah segelintir tokoh pelaksana lembaga pendidikan Islam, sehingga dengan demikian, kehadiran dan eksistensi lembaga pendidikan Islam tersebut adalah modal yang dapat dijadikan bahan bagi pelaksanaan dan pengembangan lembaga Negera yang bertugas untuk mencetak kader bangsa yang lebih baik dan lebih berkualitas, sehingga dengan demikian, Negara menjadi lebih baik.

Penutup

Sejarah Islam yang sudah berjalan lebih dari lima belas abad lamanya telah memberikan kontribusi dan meninggalkan napak tilas kesejarahan yang mampu dijadikan potret wajah kondisi pendidikan Islam yang sebenarnya, sejarah bukan hanya menggambarkan realitas kenyataan yang telah terjadi dimasa yang sebelumnya, melainkan juga berfungsi sebagai pemandu bagi generasi yang selanjutnya, agar mereka mampu untuk menjadikan pijakan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pendidikan islam di Indonesia, pada dasarnya telah terbentuk seiring dengan datangnya Agama Islam di bumi nusantara ini, karena salah satu penyebaran Islam di negeri ini adalah salah satunya melalui dunia pendidikan, disamping melalui jalur perdagangan dan perkawinan

dengan para putri penguasa atau para raja. Peran dan kiprah pendidikan Islam dalam merebut dan menyatukan bumi nusantara ini menjadi suatu Negara yang saat ini bernama Indonesia tentunya sangatlah banyak. Tidak hanya sampaidisitu, kiprah pendidikan Islam dalam mengisi kemerdekaan ini juga masih tetap enunjukkan peranannya.

Sehingga dengan demikian, dalam makalah ini, penulis sedikit menyingkap tabir sejarah pendidikan Islam pada masa orde lama, orde baru dan bahkan pada masa orde reformasi saat ini. Negara mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan, termasuk juga dalam dunia pendidikan Islam, sehingga, kondisi pendidikan Islam dari masa kemasa mempunyai kedudukan dan bahkan porsi yang sangat berbeda dari pemerintah yang kemudian akhirnya berimplikasi terhadap hasil dari pelaksanaan pendidikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Al-Bisri, Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20-pergumulan antara*

modernisasi dan Identitas, Jakarta:
Kencana Predana Media Group,
2012.

Athiyah al-Abbasyi, *Dasar-dasar pokok
pemikiran Islam*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1974.

Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam-
dalam Sistem Pendidikan Nasional di
Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam
di Indonesia*, Jakarta: Logos wacana
Ilmu, 2001.

Maksum, Madrasah, *Sejarah dan
Perkembangannya*, Jakarta: Wacana
Ilmu, 1999.

Muhaimin, *Wacana Pengembangan
Pendidikan Islam*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003.

Sjacrhan Basah, *Ilmu Negara -
Pengantar, Metode dan Sejarah
Perkembangan*, Bandung: PT.Citra
Aditya Bakti, 2007.

Tim penyusun KBBI, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Jakarta:
Blaipustaka, 2000.

Umi Chultsum, Windy Novita, *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya:
Kasiko, 2006.

Wahjoetomo, *Pesantren*, Jakarta: Rineka
Cipta, 1997.

Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih
Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam
Perubahan Nilai-nilai Pesantren*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.